



**KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN DALAM  
UPAYA PENANGANAN MASALAH BARANG RAMPASAN  
HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum**

**Oleh :**

**ERFAN EFENDI YUDI ARIANTO, SH.**

**11010110400046**

**PEMBIMBING :**

**Dr. Eko Soponyono, SH., MH.**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2012**

**KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN DALAM UPAYA  
PENANGANAN MASALAH BARANG RAMPASAN HASIL TINDAK  
PIDANA KORUPSI**

**TESIS**

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan  
Program Magister Ilmu Hukum

Mengetahui Pembimbing,

Peneliti

**Dr. Eko Soponyono, SH., MH.**

**Erfan Efendi Yudi Arianto, SH.**

**Mengetahui  
Ketua Program Magister Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro**

**Prof. Dr. Arief Hidayat, SH, MS  
NIP. 194907211976031001**

## **PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Dengan ini saya, Erfan Efendi Yudi Arianto, SH., menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi Lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua ini dari karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 22 Juni 2012

Penulis

**ERFAN EFENDI YUDI ARIANTO, SH**

**11010110400046**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa,, karena berkat rahmat, hidayah dan Karunia-Nya, penulisan tesis dengan judul **“KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN DALAM UPAYA PENANGANAN MASALAH BARANG RAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI”** ini dapat terselesaikan.

Penyusunan tesis ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan studi pada program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Dan juga penulis dedikasikan sebagai sumbangan pemikiran tentang pengoptimalan pengembalian kerugian keuangan Negara khususnya untuk tindak pidana korupsi. Sehingga penegak hukum tidak hanya mempunyai pemikiran bahwa dengan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi maka masalah dianggap selesai, namun ada hal yang tidak kalah penting yakni kembalinya kerugian keuangan Negara.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan selesainya penyusunan tesis ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat Dr. Eko Soponyono, SH., MH., selaku pembimbing, yang telah memberikan masukan dan arahan dengan penuh kesabaran dan perhatian walaupun beliau disibukkan oleh tugas-tugas lain sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan kasih sayangNya yang telah memberikan kemudahan, kesehatan, kekuatan dan perlindungan-Nya.
2. Nabi Muhammad SAW, semoga sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan untuk beliau hingga akhir zaman.
3. Bapak Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, sekaligus dosen Penguji.
4. Bapak Dr. Eko Soponyono, SH, MH selaku Pembimbing yang dengan kesabarannya telah banyak memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis tentang penulisan tesis yang benar
5. Bapak Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, SH., MH., dan Dr. Pujiono, SH., MH., selaku dosen Penguji yang sekaligus telah memberikan sumbangsih dan saran penulisan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang atas segala bantuan semangat yang diberikan selama penulis menjadi Mahasiswa.

7. Yang tercinta Istri dan Orang Tua yang telah memberi semangat dan penuh kasih sayang serta kesabaran dalam mendorong penulis untuk segera menyelesaikan Tesis ini.
8. Pimpinan dan rekan-rekan baik di Kejaksaan Agung (khususnya Satuan Tugas Khusus Barang Rampasan dan Sita Eksekusi) maupun di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
9. Semua pihak yang telah bersedia memberikan data yang diperlukan untuk penyusunan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengakui bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis harapkan dari semua pihak kritik dan saran yang bersifat membangun.

Semarang, 02 Juli 2012

P e n u l i s

## ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi ditegaskan bahwa sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945. Untuk membuat jera pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan merampas aset atau properti milik pelaku, baik aset sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi maupun aset yang dihasilkan dari suatu tindak pidana korupsi. Di sisi lain, dari sisi keuangan Negara tindakan perampasan aset pelaku juga dimaksudkan sebagai upaya pengembalian kerugian negara (*asset recovery*).

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, khususnya Pasal 18, 19 serta Pasal 21 kurang tegas dalam mengatur kebijakan sistem pemidanaan tentang pelaksanaan pidana perampasan barang;g ataupun terhadap yang mencegah, menghalangi atau menggagalkan penyelesaian barang rampasan. Sehingga diperlukan suatu reformulasi untuk masa yang akan datang.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data-data yang didapat penulis akan dianalisis dengan menggunakan kualitatif-normatif yang berhubungan dengan perampasan barang untuk mengganti kerugian keuangan Negara.

.Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat kekurangan dalam perumusan dan penerapan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya yang mengatur tentang barang rampasan ataupun tentang hal yang berhubungan dengan pengembalian kerugian keuangan Negara, baik perumusan tindak pidana maupun pidana/pemidanaannya, sehingga belum dapat memberikan optimalisasi dalam pengembalian kerugian keuangan Negara. Dengan demikian perlu formulasi yang baru dalam rangka pengoptimalisasian kerugian keuangan Negara.

Kata Kunci : Kebijakan Sistem Pemidanaan, Barang Rampasan, dan Kerugian Keuangan Negara.

## **ABSTRACT**

Criminal Corruption confirmed that it is very detrimental to the finances of the State or country's economy and hamper national development, so it must be eradicated in order to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the Constitution of the State of Indonesia in 1945. To create a deterrent criminal offenders are corruption robs the assets or property belonging to the offender, either the asset as a tool used to perform criminal acts of corruption and assets resulting from a criminal act of corruption. On the other hand, the Country's financial assets seizure action actors also intended as an attempt of return loss (asset recovery).

Law No. 31 of 1999 about Criminal Corruption Eradication jo Law No. 20 of 2001 on amendment of Law No. 31 of 1999 the Eradication of Corruption, in particular, Article 18, Article 19 and 21 less assertive in regulating the sentencing system policy about implementation of criminal appropriation asset or to prevent, hinder or that thwart the completion of swag. So it takes a rigorous reformulation for the foreseeable future.

This research using the method approach to normative and juridically it is descriptive research analytical. Obtained data will be analyzed using writer qualitative-relating to deprivation of normative goods to compensate for the loss of State finances.

From this research it is known that there is a lack can be in the formulation and implementation of Law No. 31 of 1999 the Eradication of Corruption jo Law No. 20 of 2001 on amendment of Law No. 31 of 1999 the Eradication of Corruption in particular who set about swag, or about matters relating to State financial losses, return both the formulation of a criminal offence or criminal/sentencing, so haven't been able to provide optimization in financial losses the country return. With it, however needs to be new formulations in order to optimalization the country's financial losses.

**Keywords:** The Sentencing System, Swag, and the Financial Losses of State.

## DAFTAR ISI

Halaman Judul .....	i
Halaman Pengesahan .....	ii
Surat Pernyataan .....	iii
Kata Pengantar .....	iv
Abstrak .....	vi
Abstract .....	vii
Daftar Isi .....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Pemikiran .....	12
F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	23
A. Tinjauan Umum Makna Kebijakan .....	23
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Pemidanaan .....	31
C. Pembaharuan Sistem Pemidanaan .....	48
D. Pengertian dan Jenis-jenis Barang Rampasan .....	55
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	61
A. Kebijakan Formulasi Penanganan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi Saat Ini ...	61
B. Kebijakan Formulasi Penanganan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana Korupsi Yang Akan Datang ...	92



<b>BAB IV PENUTUP</b>	150
A. Kesimpulan	150
B. Saran	151
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	152

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 1	Perbedaan Antara Criminal Forfieture dan NCB Forfieture
Tabel 2	Perbandingan Formulasi NCB Forfieture Dalam Negara Sistem Hukum Eropa Kontinental
Tabel 3	Negara-negara yang Mengatur NCB Forfeiture dalam Undang-Undang Khusus Tentang Penyitaan dan Perampasan
Tabel 4	Perbandingan Pengembalian Aset Berupa Pidana Perampasan dan Pembayaran Uang Pengganti

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia pada dasarnya merupakan tinggalan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dinamakan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvSNI). Sejak berlakunya Undang-Undang nomor 73 Tahun 1958 yang menentukan berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan Hukum Pidana dengan perubahan dan tambahan untuk seluruh Indonesia, hukum pidana materiil yang tersebut dalam perundang-undangan menjadi seragam untuk seluruh tanah air.

Berdasarkan Pasal VI. U.U. tahun 1946 no. 1, nama resminya dari "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*" diubah menjadi "*Wetboek van Strafrecht*" yang juga dapat disebut sebagai "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" sehingga KUHP menjadi up-to-date dan dapat dipakai di seluruh Nusantara.<sup>1</sup> Hal ini mengisyaratkan berlakunya KUHP Belanda di Indonesia sampai dengan sekarang serta tertuang pula dasar hukum yang memberlakukan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tertuang dalam Aturan Peralihan Pasal II Undang Undang Dasar 1945.

---

<sup>1</sup> . Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1985, hlm, V.

Indonesia tidak mempunyai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia. Akibatnya KUHP yang dipergunakan di Pengadilan dan Pendidikan tinggi hukum adalah terjemahan tidak resmi yang sangat beragam versinya.

Dalam perkembangan hukum, akhir-akhir ini terdapat penggolongan tindak pidana sebagai perwujudan dari azas "*lex specialis derogate lex general*", dimana salah satunya adalah tindak pidana korupsi yang disosialisasikan pemerintah untuk pemberantasannya, khususnya bagi para Penyelenggara/Pejabat Negara.

Tindak pidana korupsi di Indonesia telah merambah keseluruhan lini kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perkembangannya, korupsi tidak hanya makin luas, namun dilakukan secara sistematis sehingga tidak semata-mata merugikan keuangan Negara tetapi telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Dari itulah kejahatan tindak pidana korupsi digolongkan sebagai *extraordinary crime*.<sup>2</sup>

Sebagai *extraordinary crime*, pemberantasan tindak pidana korupsi seakan-akan berpacu dengan munculnya beragam modus operandi yang semakin canggih, karena itu diperlukan strategi yang tepat sebagai upaya penanggulangannya serta sinergi dan persamaan persepsi dari seluruh komponen bangsa. Selain itu, tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat sulit pembuktiannya karena modus operandinya selalu

---

<sup>2</sup>. Ichsan Kawanto, Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Press, 2009, hlm. 1.

mengalami dinamisasi dari segala sisi sehingga dapat dikatakan sebagai *invisible crime* yang sangat sulit memperoleh prosedural pembuktiannya. Harus diakui, pemberantasan tindak pidana korupsi lebih berfokus kepada tindakan represif (penindakan). Tampaknya, pemberantasan tindak pidana korupsi yang hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana khususnya tindakan represif saja dinilai sulit untuk mencapai hasil maksimal.

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya sebut Undang-Undang Tipikor) ditegaskan bahwa tindak pidana korupsi sangat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara dan menghambat pembangunan nasional, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Indonesia dikenal dunia sebagai salah satu Negara terkorup, (menurut survey *Transparency International*) seperti yang di kutip oleh antaranews.com, menyatakan bahwa :

Indonesia masih merupakan salah satu dari kelompok negara terkorup di dunia, setidaknya ditunjukkan oleh Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) 2011 yang dirilis oleh *Transparency International* di Berlin.

Dalam survei CPI yang dilakukan terhadap 183 negara di dunia, Indonesia menempati peringkat ke-100 dengan skor 3,0 poin bersama 11 negara lainnya yakni Argentina, Benin, Burkina Faso, Djibouti,

Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname dan Tanzania.

Indeks skor 183 negara mulai dari 0 (sangat korup) sampai 10 (sangat bersih) berdasarkan tingkat persepsi korupsi sektor publik. CPI mengukur persepsi korupsi yang dilakukan politisi dan pejabat publik dihasilkan dari penggabungan 17 survei lembaga-lembaga internasional yang melihat faktor-faktor seperti penegakan hukum anti korupsi, akses terhadap informasi dan konflik kepentingan. Menurut *Transparency International*, korupsi terus mewabah di banyak negara di seluruh dunia. Ini menunjukkan beberapa pemerintah gagal melindungi warga negaranya dari korupsi, baik itu penyalahgunaan sumber daya publik, penyuapan atau pengambilan keputusan rahasia.

*Transparency International* memperingatkan bahwa protes di seluruh dunia, sering didorong oleh korupsi dan ketidakstabilan ekonomi, jelas menunjukkan warga merasa pemimpin mereka dan lembaga-lembaga publik tidak transparan dan tidak cukup akuntabel.

Di jajaran Negara ASEAN, Indonesia tampak kalah dari Brunei di peringkat 44 (skor 5,2), Malaysia peringkat 50 (skor 4,3), dan Thailand di peringkat 80 (skor 3,4).

Indonesia hanya lebih baik daripada Vietnam di peringkat 112 dengan skor 2,9 poin, Filipina peringkat 129 (skor 2,6), Laos peringkat 154 (skor 2,2), Kamboja peringkat 164 (skor 2,1) dan Myanmar di peringkat 180 (skor 1,5).<sup>3</sup>

Sebagai negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, tujuan Negara adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Prinsip Negara yang berdasarkan atas hukum, selain membawa pengertian bahwa hukum membatasi secara tegas dan jelas mana kekuasaan yang terbilang kewenangan dan mana yang di bilang kesewenang-wenangan, juga bermakna hanya pada Negara yang berdasarkan pada hukum ada perlindungan hak-hak kemanusiaan, terwujudnya Kelembagaan Negara

---

<sup>3</sup> <http://www.antaranews.com/berita/287320/indonesia-masih-tergolong-negara-terkorup>, yang di unggah pada Kamis, 1 Desember 2011 22:53 WIB.

yang demokratis, ada suatu sistem hukum yang tertib dan ada suatu kekuasaan kehakiman yang bebas.

Perilaku dan sifat korup masyarakat Indonesia dikenal sejak jaman kerajaan-kerajaan Indonesia, jaman Hindia Belanda, sampai jaman kemerdekaan sekarang. Korupsi pada jaman sekarang ini dilatarbelakangi oleh adanya kepentingan atau motif kekuasaan dan/atau kekayaan.

Pemerintah Indonesia sebetulnya tidak tinggal diam dalam mengatasi praktek-praktek korupsi. Upaya pemerintah dilaksanakan melalui berbagai upaya mulai dari pembenahan peraturan perundang-undangan hingga membentuk komisi-komisi yang berhubungan langsung dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Seiring dengan perkembangan zaman, berbagai kemajuan terjadi dalam setiap aspek kehidupan manusia tak terkecuali tindak pidana korupsi baik berupa kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Kini, tindak pidana korupsi tidak lagi dilakukan dengan cara-cara yang sederhana, tetapi lebih terorganisir melibatkan banyak pihak dan dilakukan dengan metode atau perangkat yang sangat maju dengan motif ekonomi yang besar. Akibatnya, kejahatan tersebut sulit diberantas, memiliki daya rusak yang luar biasa secara ekonomi, dan merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kesulitan tersebut disebabkan oleh dua hal, yaitu tingginya motif ekonomi kejahatan tersebut dan kompleksitas modus operandinya. Pengenaan hukuman dalam sistem hukum pidana di Indonesia terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda, serta pidana tambahan yang meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim, sudah sewajarnya untuk disempurnakan.

Sejalan dengan semakin berkembang jenis dan modus kejahatan sebagaimana tersebut di atas, tindakan menghukum pelaku tindak pidana secara konvensional, yaitu dengan cara menerapkan pidana penjara bagi pelaku, tidak selalu berhasil mengurangi tingkat kejahatan dimaksud. Selain memberi efek jera bagi para pelaku, bentuk pemidanaan harus dapat melucuti pelaku dari potensi ekonomi yang dapat menggerakkan atau menghidupkan kembali tindak kejahatan. Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk membasmi kejahatan-kejahatan tersebut. Salah satu upaya adalah dengan membatasi penggunaan aset atau manfaat ekonomi yang terkait dengan kejahatan. Oleh karena itu, menjadi hal yang cukup penting dalam konteks menghilangkan motivasi seseorang melakukan tindak pidana korupsi melalui pendekatan pelacakan, pembekuan, penyitaan dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Seseorang ataupun korporasi dengan sendirinya akan menjadi enggan atau tidak memiliki motivasi untuk melakukan suatu perbuatan pidana

apabila hasil perbuatan pidana korupsi dikejar dan dirampas untuk negara.

Salah satu upaya cara untuk membuat jera pelaku tindak pidana korupsi adalah dengan merampas aset atau properti milik pelaku, baik aset sebagai alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi maupun aset yang dihasilkan dari suatu tindak pidana korupsi. Di sisi lain, dari sisi keuangan negara tindakan perampasan aset pelaku juga dimaksudkan sebagai upaya pengembalian kerugian Negara (*asset recovery*).

Dalam pelaksanaan *asset recovery*, suatu sistem untuk identifikasi, klasifikasi, penyimpanan, pengelolaan, dan pelepasan mutlak diperlukan. Tanpa sistem tersebut, hasil dari proses penyitaan dan perampasan aset tindak pidana tidak akan maksimal. Bahkan, hasil dari penyitaan dan perampasan rawan diselewengkan oknum pihak pengelola dan justru menjadi unsur tindak kejahatan baru. Dalam Bab VI Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Tindak Pidana, para perumus telah memasukkan aspek pengelolaan dalam rancangan tersebut.<sup>4</sup> Hal ini merupakan suatu langkah maju bagi sistem hukum Indonesia. Dengan diaturnya aspek pengelolaan aset tindak pidana, diharapkan dapat meningkatkan keberhasilan program *asset recovery* di Indonesia.

---

<sup>4</sup> [www.djpp.depkumham.go.id/rancangan/inc/buka.php](http://www.djpp.depkumham.go.id/rancangan/inc/buka.php)



Upaya pengembalian kerugian negara (*asset recovery*) merupakan sub-sistem dari sistem pemidanaan. Tentang sistem pemidanaan, Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa :<sup>5</sup>

Apabila pengertian pemidanaan diartikan sebagai pemberian atau penjatuhan pidana, maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut, antara lain :

1. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
  - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/konkretisasi pidana;
  - Keseluruhan sistem (perundang-undangan) bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasikan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

Dengan pengertian demikian, maka sistem pemidanaan identik dengan sistem penegakan hukum pidana yang terdiri dari subsistem Hukum Pidana Materiil/Substantif, subsistem Hukum Pidana Formal dan subsistem Hukum Pelaksanaan Pidana.

2. Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif/substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
  - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
  - Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Keseluruhan peraturan perundang-undangan (*statutory rules*) yang ada didalam KUHP, pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan sistem pemidanaan, yang terdiri dari aturan umum (*general rules*) dan aturan khusus (*special rules*). Aturan umum KUHP terdapat di dalam Buku I KUHP, dan aturan khusus terdapat di dalam Buku II dan III KUHP maupun dalam UU Khusus diluar KUHP.

Berdasarkan pengertian sistem pemidanaan dalam arti luas tersebut di atas, dalam upaya untuk melucuti pelaku tindak pidana baik aset sebagai

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia*, cetakan ke-II, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 2.

alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi maupun aset yang dihasilkan dari suatu tindak pidana korupsi, serta tindakan perampasan aset yang dimaksudkan sebagai upaya pengembalian kerugian Negara (*asset recovery*), maka perlu dilakukan sinkronisasi atau harmonisasi aturan perundang-undangan antara Hukum Pidana Materiil, Hukum Pidana Formal maupun Hukum Pelaksanaan Pidana, khususnya yang mengatur tentang perampasan barang-barang milik pelaku tindak pidana korupsi.

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam memenuhi tugas akhir (tesis) dengan judul “***KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN DALAM UPAYA PENANGANAN MASALAH BARANG RAMPASAN HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI***”

## **B. Perumusan Masalah**

Bertolak dari uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan pokok dalam tesis berkisar pada perkembangan penanganan aset dari pelaku tindak pidana korupsi atau barang yang statusnya sudah menjadi Barang Rampasan hasil tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya, aturan perundang-undangan pelaksanaan untuk melakukan perampasan barang milik pelaku tindak pidana (terpidana) korupsi serta proses penyelesaian penanganan barang yang statusnya sudah menjadi Barang Rampasan, tidak bisa dipertahankan lagi. Karena banyak menimbulkan masalah baru dalam pelaksanaannya,

dengan demikian keadilan yang dicari pun semakin jauh dan seolah tak bisa terkejar, serta sangat menghambat proses pengembalian kerugian keuangan Negara. Oleh karena itu perlu ada kebijakan untuk memformulasi ulang peraturan perundang-undangan penanganan pelaksanaan untuk melakukan perampasan barang milik pelaku tindak pidana korupsi (terpidana), maupun barang yang statusnya sudah menjadi Barang Rampasan agar lebih sesuai dengan tujuan dari penanganan Barang Rampasan yakni mengembalikan Keuangan Negara (*asset recovery*).

Dengan demikian, permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan formulasi sistem pemidanaan dalam upaya penanganan masalah Barang Rampasan hasil tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian keuangan Negara saat ini?
2. Bagaimana kebijakan formulasi sistem pemidanaan dalam upaya penanganan masalah Barang Rampasan hasil tindak pidana korupsi untuk pengembalian kerugian keuangan Negara pada masa yang akan datang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, adapun tujuan dari penulisan ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan formulasi sistem pemidanaan dalam upaya penanganan masalah Barang Rampasan hasil tindak pidana korupsi saat ini.
2. Untuk mengetahui bagaimana kebijakan formulasi sistem pemidanaan dalam upaya penanganan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penanganan masalah Barang Rampasan dalam rangka membuat jera para pelaku tindak pidana korupsi yang mempunyai efek besar di bidang ekonomi serta optimalisasi pengembalian kerugian keuangan Negara pada masa yang akan datang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian dan penulisan ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis, kiranya hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan teori hukum pidana dalam memecahkan problematika penanganan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penanganan Barang Rampasan hasil tindak pidana korupsi dalam rangka pembaharuan sistem hukum pidana Indonesia.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis, kiranya dari hasil penelitian ini pula diharapkan dapat melengkapi perangkat peraturan serta pelaksanaan

penanganan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penanganan Barang Rampasan hasil tindak pidana korupsi, terutama dilihat sebagai bagian proses penegakan hukum menuju pembaharuan sistem hukum pidana Indonesia guna membuat jera para pelaku tindak pidana yang mempunyai efek besar di bidang ekonomi.

## **E. Kerangka Pemikiran**

### **1. Sistem Pemidanaan.**

Seperti yang dikemukakan oleh Hulsman yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, bahwa :<sup>6</sup>

Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*)

Sesuai dengan pernyataan di atas dapat diartikan bahwa Sistem Pemidanaan adalah semua peraturan yang mengatur tentang masalah kebijakan sanksi pidana terhadap perbuatan yang dianggap sebagai kejahatan atau pelanggaran. Selain itu, sistem pemidanaan tidak bisa lepas dari pemidanaan itu sendiri sebagai wujud dari sanksi pidana yang berupa pemberian atau penjatuhan pidana.

Pemidanaan mempunyai pedoman serta tujuan tersendiri dan Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pedoman dan tujuan pemidanaan didasarkan pada pemikiran : <sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid. hlm 1.

- Sistem hukum merupakan satu kesatuan sistem yang bertujuan (purposive system) dan pidana hanya merupakan alat/sarana untuk mencapai tujuan;
- "tujuan pidana merupakan bagian integral (sub-sistem) dari keseluruhan sistem pemidanaan (sistem hukum pidana) disamping sub-sistem lainnya, yaitu sub-sistem "tindak pidana", "pertanggung jawaban pidana (kesalahan)", dan "pidana".
- Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali/control/pengarah dan sekaligus memberikan dasar/landasan filosofis, rasionalitas, motivasi, dan justifikasi pemidanaan;
- Dilihat secara fungsional/opersional, sistem pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses melalui tahap "formulasi" (kebijakan legislatif), tahap "aplikasi" (kebijakan judicial/judikatif), dan tahap "eksekusi" (kebijakan administrative/eksekutif); oleh karena itu agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan, diperlukan perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan.

Berdasarkan pada pemikiran yang terakhir, sistem pemidanaan merupakan suatu keterpaduan antara formulasi, aplikasi dan eksekusi. Formulasi tidak hanya terbatas pada hukum pidana materiil, namun juga termasuk hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana. Formulasi hukum pidana formil dibutuhkan dalam rangka menegakkan hukum pidana materiil, sedangkan formulasi hukum pelaksanaan pidana diperlukan untuk mencapai tujuan dari pidana.

Reformulasi hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana yang berasaskan Pancasila diperlukan guna membangun sistem hukum nasional Indonesia yang berlandaskan Ketuhanan.

---

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2009, hlm. 3

## 2. Pengertian Barang Rampasan.

Barang rampasan adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>8</sup>

Di dalam kamus hukum menyebutkan tentang pengertian rampasan, yaitu hukuman tambahan yang memungkinkan pemilikan suatu barang oleh atas benda-benda yang dimiliki/dikuasai atau yang berasal dari kejahatan yang telah dilakukan dan telah dijatuhi hukuman.<sup>9</sup>

Perampasan barang terhadap barang yang menjadi alat atau barang bukti, tersirat didalam beberapa peraturan perundang-undangan. Didalam Pasal 273 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa :

“Jika putusan pengadilan juga menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, jaksa menguasai benda tersebut kepada kantor lelang negara dan dalam waktu tiga bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa”

Sedangkan didalam Pasal 18 Undang-Undang Tipikor menyatakan bahwa :<sup>10</sup>

Ayat (1)

---

<sup>8</sup> Kejaksaan Agung RI. Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan. Jakarta : Kejaksaan Agung RI. 1988 hlm. 1206.

<sup>9</sup> Simorangkir, J.C.T.,dkk. Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika 2000 hlm. 126.

<sup>10</sup> . [www.proxis.com/perundangan/LH/doc/uu/C00-1999-00031.pdf](http://www.proxis.com/perundangan/LH/doc/uu/C00-1999-00031.pdf)

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut;
- b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c) penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

Ayat (2)

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Ayat (3)

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Barang rampasan ini apabila akan dilakukan pelelangan itu dilaksanakan secara bersama, tidak dapat dilakukan secara terpisah kecuali bila keadaan terdesak seperti yang dijelaskan di dalam point 9 Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menyebutkan bahwa :

“Terhadap barang rampasan yang termasuk dalam satu putusan Pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan di jual lelang secara terpisah-pisah, kecuali dalam keadaan terdesak.”<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Kejaksaan Agung RI. Himpunan ..... Op cit, hlm. 1210.



Adapun barang rampasan yang dimasukkan di dalam point 9 Surat Edaran tersebut terhadap barang rampasan yang diperkenankan secara terpisah antara lain : barang sengketa dalam perkara perdata, barang yang dituntut oleh pihak ketiga, barang yang akan diajukan bagi kepentingan Negara atau Sosial, barang yang akan diajukan untuk dimusnahkan dan barang rampasan yang berada di luar daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan. Terhadap barang rampasan yang berada di wilayah perairan itu sebelum dilakukan pelelangan itu harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan seperti yang disebutkan di dalam point 7 huruf d Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dan apabila izin itu telah diberikan maka pelelangan terhadap barang rampasan tersebut dapat dilaksanakan. Biasanya barang rampasan di wilayah perairan tersebut digunakan untuk kepentingan Negara.<sup>12</sup>

Menurut peraturan pelaksanaan lelang terhadap Barang Rampasan, terhadap Barang Rampasan yang keberadaannya dapat membahayakan bagi kepentingan Negara atau sosial, dengan kata lain tidak dapat dipergunakan lagi (berdasarkan sub V. narkotika point 5 Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan)<sup>13</sup>, maka barang rampasan tersebut dimusnahkan seizin pihak yang berwenang. Contoh barang rampasan yang tidak

---

<sup>12</sup> Ibid hlm. 1214.

<sup>13</sup> Ibid hlm.. 1224.

dapat dipergunakan ini antara lain : jenis-jenis tertentu dari narkotika seperti ganja, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah *yuridis normatif* dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian bukan hanya terbatas pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang penerapan penanganan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penanganan Barang Rampasan hasil tindak pidana korupsi sebatas legalitas materiil dan formal, akan tetapi juga tinjauan terhadap kasus-kasus yang sampai saat ini belum terselesaikan pelaksanaan lelang Barang Rampasannya karena terkendala perangkat perundang-undangan yang belum mengatur. Namun demikian, penelitian tidak saja terhadap bahan perundang-undangan di Indonesia tetapi juga bahan-bahan dan aturan perundang-undangan dari berbagai negara yang mengatur tentang penanganan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penanganan Barang Rampasan.

### **2. Pendekatan Masalah**

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni *yuridis normatif*, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statuta-approach*), pendekatan konsep

(*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*)<sup>14</sup> dan observasi kasus (*case observation*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaanannya justru kondusif bagi terlaksananya penerapan penanganan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penanganan barang rampasan (formal) yang mengabaikan kendala pembiayaan pada pelaksanaannya (material). Pendekatan konsep digunakan untuk memahami konsep-konsep penanganan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penanganan Barang Rampasan sehingga diharapkan penormaan dalam aturan hukum, tidak lagi membatasi ruang lingkup penanganan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penanganan Barang Rampasan hanya sebatas undang-undang atau teori prosedur pelaksanaannya tetapi mencakup juga menyangkut hukum acara pelaksanaan serta anggaran yang digunakan. Pendekatan perbandingan dilakukan untuk melihat dan membandingkan perundang-undangan negara lain yang mengatur tentang Barang Rampasan. Sedangkan pendekatan observasi lapangan digunakan untuk menemukan aspirasi atau masukan dari pelaksanaan penanganan barang rampasan. Masukan dari bahan hukum negara lain serta aspirasi dari aparat pelaksana (eksekutor) dilapangan akan menjadi bahan analisis terhadap apa yang sama dan apa yang mungkin berbeda dalam penormaan. Hal ini dimaksudkan untuk

---

<sup>14</sup> Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya : Bayumedia Publishing, 2005, hlm. 444.

memperkaya bahan hukum bagi kebijakan reformulasi penanganan barang rampasan ke depan.

### 3. Jenis Data

Bertolak dari tipe penelitian yang digunakan adalah *yuridis normatif*, maka jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang diurut berdasarkan hirarki mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang (KUHP, dll), Peraturan Pemerintah, Keputusan Jaksa Agung, Peraturan Menteri Keuangan dan peraturan lainnya, serta bahan hukum asing sebagai pembandingan bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat pola kecenderungan pengaturan penanganan barang rampasan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal, pendapat para sarjana, bahan seminar/simposium yang dilakukan oleh para pakar terkait dan hasil wawancara dengan aparat penegak hukum (eksekutor pidana) yang dalam hal ini adalah pihak Kejaksaan.

- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

#### 4. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dilakukan dengan study kepustakaan. Oleh karena itu bahan-bahan tersebut dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan dan diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

#### 5. Metode Analisis Data

Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan terutama Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan bahan hukum penunjang lainnya serta hasil observasi kasus, penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan

hukum dilakukan secara deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan masalah reformulasi penanganan barang rampasan dalam pembaharuan sistem hukum Indonesia.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam bab II tentang Tinjauan Pustaka meliputi Makna Kebijakan, Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Pemidanaan, Pembaharuan Sistem Pemidanaan dan Pengertian Barang Rampasan.

Selanjutnya dalam bab III, dibahas dua hal, pertama : tentang formulasi penanganan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penanganan perampasan suatu barang milik pelaku tindak pidana maupun barang yang statusnya adalah Barang Rampasan, dan yang kedua : tentang reformulasi penanganan aset pelaku tindak pidana korupsi dan penanganan perampasan suatu barang milik pelaku tindak pidana korupsi maupun barang yang statusnya adalah barang rampasan hasil tindak pidana korupsi dalam pembaharuan sistem hukum pidana Indonesia pada masa yang akan datang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta

peraturan perundang-undangan dibawahnya sesuai dengan amanat reformasi dan arah Sistem Hukum Nasional (SHN) dalam rangka untuk membangun sebuah sistem hukum pidana nasional yang sesuai dengan semangat dan spirit keindonesiaan karena penanganan perampasan suatu barang milik pelaku tindak pidana maupun barang yang statusnya adalah barang rampasan merupakan asas sentral dalam penanganan hukum pidana baik sebagai penentu selesainya penanganan suatu kasus pidana maupun spirit pengembalian kerugian keuangan Negara sebagai pemasukan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Akhirnya, dalam bab IV dikemukakan rangkuman hasil penelitian dan analisis bab-bab terdahulu sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai perlunya reformulasi peraturan perundang-undangan khususnya dibidang penanganan Barang Rampasan hasil tindak pidana korupsi. Saran-saran disampaikan sebagai sumbangan pemikiran ilmiah yang diharapkan dapat memberi masukan dalam rangka reformulasi peraturan perundang-undangan penanganan barang rampasan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Makna Kebijakan

Banyak definisi yang dibuat oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Thomas Dye menyebutkan (yang dikutip oleh Sofa):<sup>15</sup>

Kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (*whatever government chooses to do or not to do*). Definisi ini dibuatnya dengan menghubungkan pada beberapa definisi lain dari David Easton, Lasswell dan Kaplan, dan Carl Friedrich. Easton menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai “kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan.” Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya dapat mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Sementara Lasswell dan Kaplan yang melihat kebijakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, menyebutkan kebijakan sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek (*a projected program of goals, values and practices*). Carl Friedrich mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objektive*) atau kehendak (*purpose*).

H. Hugh Heglo menyebutkan kebijakan sebagai “*a course of action intended to accomplish some end*,” atau sebagai suatu tindakan yang bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Heglo ini selanjutnya diuraikan oleh Jones dalam kaitan dengan beberapa isi dari kebijakan. Selanjutnya Heglo mengatakan bahwa kebijakan lebih dapat digolongkan sebagai suatu alat analisis daripada sebagai suatu rumusan kata-kata. Sebab itu, katanya, isi dari suatu kebijakan lebih dapat dipahami oleh para analis daripada oleh para perumus dan pelaksana kebijakan itu sendiri. Bertolak dari sini, Jones merumuskan kebijakan sebagai “*...behavioral consistency and repetitiveness associated with efforts in and through government to resolve public problems*” (perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada di dalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum). Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan.

---

<sup>15</sup><http://massofa.wordpress.com/2008/11/13/kajian-ilmu-kebijakan-dan-pengertian-kebijakan>, di unggah pada tanggal 13 November 2008.



Sejalan dengan perkembangan studi yang makin maju, William Dunn mengaitkan pengertian kebijakan dengan analisis kebijakan yang merupakan sisi baru dari perkembangan ilmu sosial untuk pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebab itu dia mendefinisikan analisis kebijakan sebagai "ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai metode untuk menghasilkan dan mentransformasikan informasi yang relevan yang dipakai dalam memecahpersoalan dalam kehidupan sehari-hari. "Di sini dia melihat ilmu kebijakan sebagai perkembangan lebih lanjut dari ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Metodologi yang dipakai bersifat multidisiplin. Hal ini berhubungan dengan kondisi masyarakat yang bersifat kompleks dan tidak memungkinkan pemisahan satu aspek dengan aspek lain.

Pertama, tujuan di sini yang dimaksudkan adalah tujuan tertentu yang dikehendaki untuk dicapai (*the desired ends to be achieved*). Bukan suatu tujuan yang sekedar diinginkan saja. Dalam kehidupan sehari-hari tujuan yang hanya diinginkan saja bukan tujuan, tetapi sekedar keinginan. Setiap orang boleh saja berkeinginan apa saja, tetapi dalam kehidupan bernegara tidak perlu diperhitungkan. Baru diperhitungkan kalau ada usaha untuk mencapainya, dan ada "faktor pendukung" yang diperlukan.

Kedua, rencana atau proposal yang merupakan alat atau cara tertentu untuk mencapainya. Ketiga, program atau cara tertentu yang telah mendapat persetujuan dan pengesahan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Keempat, keputusan, yakni tindakan tertentu yang diambil untuk menentukan tujuan, membuat dan menyesuaikan rencana, melaksanakan dan mengevaluasi program dalam masyarakat.

Selain itu, istilah kebijakan dalam beberapa tulisan disebut dengan "politik"<sup>16</sup>, "*policy*" (Inggris) , "*politick*" (Belanda)<sup>17</sup> yang kemudian dapat

---

<sup>16</sup> Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung : Penerbit SinarBaru, 1983, hlm 16.

disebut pula sebagai politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah “politik hukum pidana” ini sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.<sup>18</sup>

Sudarto memberikan arti politik hukum sebagai berikut :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.<sup>19</sup>
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>20</sup>

Mahfud merumuskan politik hukum sebagai:<sup>21</sup>

Kebijakan hukum yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah; mencakup pula pengertian tentang bagaimana politik mempengaruhi hukum dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum itu. Di sini hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai pasal-pasal yang bersifat imperatif atau keharusan-keharusan, melainkan harus dipandang sebagai subsistem yang dalam kenyataan bukan tidak mungkin sangat ditentukan oleh politik, baik dalam perumusan materi dan pasal-pasal-pasal-pasalnya maupun dalam implementasi dan penegakannya.

Pendapat Marc Ancel yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang menyebutkan bahwa “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang

---

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana, 2010, hlm 26.

<sup>18</sup> Loc.cit.

<sup>19</sup> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1981, hlm 159. Lihat juga Barda Nawawi Arief, BungaRampai ..... Op.cit, alm 26

<sup>20</sup> Sudarto, Hukum Pidana dan ..., Op.cit., hlm 20.

<sup>21</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi), Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 12

pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana Putusan Pengadilan, mempunyai persamaan dengan definisi politik hukum pidana yang dikemukakan oleh Sudarto.<sup>22</sup>

Selanjutnya dinyatakan olehnya :<sup>23</sup>

"Di antara studi mengenai faktor-faktor kriminologis di satu pihak dan studi mengenai teknik perundang-undangan di lain pihak, ada tempat bagi suatu ilmu pengetahuan yang mengamati dan menyelidiki fenomena legislatif dan bagi suatu seni yang rasional, di mana para sarjana dan praktisi, para ahli kriminologi dan sarjana hukum dapat bekerja sama tidak sebagai pihak yang saling berlawanan atau saling berselisih, tetapi sebagai kawan sekerja yang terikat di dalam tugas bersama, yaitu terutama untuk menghasilkan suatu kebijakan pidana yang realistik, dan berpikiran maju (progresif) lagi sehat.

*"(Between the study of criminological factors on the one hand, and the legal technique on the other, there is room for a science which observes legislative phenomenon and for a rational art within which scholar and practitioners, criminologist and lawyers can come together, not as antagonists or in fratricidal strike, but as fellowworkers engaged in a common task, which is first and foremost to bring into effect a realistic, humane, and healthy progressive penal policy).*

Pengertian politik kriminal menurut Sudarto dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas, yaitu :<sup>24</sup>

- a. dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;

---

<sup>22</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..... Op.cit, hlm 23

<sup>23</sup> Loc.cit

<sup>24</sup> Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Alumni, 1986, hlm 113-114.

- b. dalam arti yang lebih luas adalah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
- c. dalam arti paling luas adalah keseluruhan kebijakan dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.<sup>25</sup>

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut.<sup>26</sup>

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>27</sup> Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".<sup>28</sup>

Kebijakan penegakan hukum khususnya hukum pidana tidak lepas dari kebijakan sosial (*social policy*) yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social welfare* dan *social defence*). Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarto yang menyatakan, apabila hukum pidana hendak

---

<sup>25</sup> Sudarto, Hukum dan ..., Op.cit, hlm 38. Lihat juga Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..., Op.cit., hlm 1.

<sup>26</sup> Sudarto, Kapita Selekta ..... Op.cit., hlm 114.

<sup>27</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai.....Op.cit, hlm 26-27.

<sup>28</sup> Ibid, hlm 28. Politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana karena kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan.

dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence, planning* dan ini pun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional".<sup>29</sup>

Hal tersebut juga dinyatakan oleh G. Peter Hoefhagels bahwa:

*criminal policy as science of policy is part of a larger policy: the law enforcement policy....Criminal policy is also manifest as science and as application. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.*<sup>30</sup> Di tingkat internasional, hal ini dinyatakan dalam UN *Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and a New International Economic Order* yang menegaskan bahwa *Crime Prevention as part of Social Policy*.<sup>31</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya melakukan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakekatnya termasuk bidang "*penal policy*" yang merupakan bagian dan terkait erat dengan "*law enforcement policy*", "*criminal policy*" dan "*social policy*". Ini berarti, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya :<sup>32</sup>

- a. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum;
- b. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memberantas/menanggulangi tindak pidana dalam rangka perlindungan masyarakat;
- c. Merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (yaitu "*social defence*" dan "*social welfare*");

---

<sup>29</sup> Sudarto, Hukum dan . . . , Op.cit, halaman 104. Lihat juga Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai . . . . . , Op.cit, hlm 6.

<sup>30</sup> G Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology*, Belanda : Kluwer, 1969, .hlm. 57

<sup>31</sup> Sri Sumiati, *Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban tindak Pidana Di Bidang Medis*, Tesis Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang : UNDIP, 2009, hlm 28.

<sup>32</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung : PT Citra Adhya Bakti, 2005, hlm 3.

- d. Merupakan upaya peninjauan dan penilaian kembali ("*reorientasi* dan *reevaluasi*") pokok-pokok pemikiran, ide-ide dasar atau nilai-nilai sosio-filosofik, sosio-politik dan sosio-kultural yang melandasi kebijakan kriminal dan kebijakan (penegakan) hukum pidana selama ini. Bukankah pembaharuan (reformasi) hukum pidana apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WVS).

Secara singkat Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*).<sup>33</sup>

Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya pembaharuan hukum pidana hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Didalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan-nilai.<sup>34</sup>

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa. pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-kebijakan adalah :<sup>35</sup>

- a. sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang rujukan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);

---

<sup>33</sup> Ibid. hlm 3-4

<sup>34</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai.....Op.cit, hlm 29

<sup>35</sup> Ibid, hlm 29-30

- b. sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan tindak pidana);
- c. sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

Sedangkan pembaharuan hukum pidana dilihat dari sudut pendekatan-nilai merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (reorientasi dan reevaluasi) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.<sup>36</sup>

Pembaharuan hukum pidana sendiri memiliki tiga masalah pokok yaitu: tindak pidana, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana. Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan Barda Nawawi Arief, bahwa permasalahan pembaharuan hukum pidana itu terkait dengan masalah perbuatan apa yang sepatutnya dipidana, syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk memperlakukan atau mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan itu, dan sanksi apa yang sepatutnya dikenakan pada orang itu.<sup>37</sup>

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal-law enforcement policy* operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif); tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/*yudicial*) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Tahap formulasi adalah tahap

---

<sup>36</sup> Ibid, hlm 30.

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm 11.

penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini undang-undang dibuat oleh lembaga legislatif yang merupakan langkah awal untuk mulainya hukum pidana. Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai ke Pengadilan, sedangkan tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana.

Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pada tahap aplikasi dan eksekusi.<sup>38</sup>

## **B. Pengertian dan Ruang Lingkup Sistem Pidanaan**

“Sistem” dalam kamus umum bahasa Indonesia mengandung dua arti yaitu seperangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, dan juga dapat diartikan sebagai susunan yang teratur dari pada pandangan, teori, asas dan sebagainya atau diartikan pula sistem itu “metode”.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Lihat Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum....., Op.cit hlm 75.

<sup>39</sup> Kamus Umum Bahasa Indonesia, Bandung : Yrama Widya, 2003, hlm. 565



Dari pengertian “Sistem” di atas dapat ditarik suatu makna bahwa sebuah sistem mengandung “keterpaduan” atau “integralitas” beberapa unsur atau faktor sebagai pendukungnya sehingga menjadi sebuah sistem.

“Pemidanaan” atau pemberian/penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna “*sentence*” atau “*veroordeling*”<sup>40</sup>

Hulsman pernah mengemukakan bahwa sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah “aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan” (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*)<sup>41</sup> selanjutnya dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief apabila pengertian “pemidanaan” diartikan sebagai suatu “pemberian atau penjatuhan pidana” maka pengertian sistem pemidanaan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut :

- a. Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional yaitu dari sudut bekerjanya/prosesnya. Dalam arti luas ini sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
  - 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) untuk fungsionalisasi/operasionalisasi/ konkretisasi pidana.
  - 2) Keseluruhan sistem (perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.

---

<sup>40</sup> Muladi dan Barda N.A., Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Alumni, 1998, hlm

<sup>41</sup> L.H.C. Hulsman, The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective dalam Barda N.A. Perkembangan Sistem Pemidanaan, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005, hlm. 1.

b. Dalam arti sempit, sistem pidana dilihat dari sudut normatif/substantif yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif. Dalam arti sempit ini maka sistem pidana dapat diartikan sebagai :

- 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pidana.
- 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/penjatihan dan pelaksanaan pidana.<sup>42</sup>

Dari pengertian sistem pidana di atas dapat dikatakan bahwa keseluruhan aturan perundang-undangan yang ada dalam KUHP dan yang di luar KUHP yang bersifat khusus semuanya merupakan sistem pidana. Sistem Pidana yang dituangkan perumusannya di dalam undang-undang pada hakikatnya merupakan suatu sistem kewenangan menjatuhkan pidana.<sup>43</sup> Dari pernyataan di atas secara implisit terkandung makna bahwa sistem pidana memuat kebijakan yang mengatur dan membatasi hak dan kewenangan pejabat/aparat negara di dalam mengenakan/menjatuhkan pidana. Di samping itu sistem pidana juga mengatur hak/kewenangan warga masyarakat pada umumnya.

Sistem pidana adalah sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pidana yang biasa juga diartikan “pemberian pidana” tidak lain merupakan suatu “proses kebijakan” yang

---

<sup>42</sup> Ibid, hlm. 2

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek...Op.cit, hlm. 114.

sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahap yaitu : <sup>44</sup>

- a. tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
- b. tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang . dan,
- c. tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Keterpaduan dari ketiga tahapan di atas yang menjadikan sebuah sistem dan tahap penetapan pidana memegang peranan yang penting di dalam mencapai tujuan di bidang pemidanaan dan tahap ini harus merupakan tahap perencanaan yang matang dan yang memberi arah pada tahap-tahap berikutnya yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pedoman adalah kumpulan atau ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilaksanakan, pedoman juga diartikan hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dsb) untuk menentukan atau melaksanakan sesuatu. <sup>45</sup>

Berkaitan dengan pemidanaan maka pedoman pemidanaan dapat diartikan ketentuan dasar yang memberi arah/melaksanakan pemidanaan

---

<sup>44</sup>Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana : Masalah PemidanaanSehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 91

<sup>45</sup> Kamus Dasar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Edisi kedua, 1999, hlm. 740.

atau pemberian pidana atau penjatuhan pidana. Dengan demikian “ketentuan dasar” pemidanaan harus ada terlebih dahulu sebelum penjatuhan pidana atau dapat diartikan bahwa ketentuan dasar untuk pemidanaan tertuang secara eksplisit dalam sistem pemidanaan, sedangkan sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif-substantif (hanya dilihat dari norma hukum pidana substantif) diartikan sebagai keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan atau keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemberian/penjatuhan dan pelaksanaan pidana.<sup>46</sup>

Jadi ketentuan dasar yang dijadikan arah, pegangan, petunjuk untuk melaksanakan pemidanaan/pemberian pidana menjadi bagian dari keseluruhan aturan/norma hukum pidana materiil untuk pemidanaan. Membicarakan ketentuan dasar pemidanaan sama dengan membicarakan asas-asas yang menjadi dasar pemidanaan dan yang merupakan asas yang fundamental yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas. KUHP (WvS) sebagai *ius constitutum* yang memuat prinsip-prinsip umum (*general principle*) hukum pidana dan pemidanaan tidak secara eksplisit mencantumkan kedua asas di atas. Hal ini dipertegas oleh Sudarto yang menyatakan : KUHP kita tidak memuat pedoman pemberian pidana (*strafvoetingsleiddraad*) yang umum ialah suatu pedoman yang dibuat oleh pembentuk undang-undang yang memuat asas-asas yang perlu

---

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP 2004, hlm. 2

diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana, yang ada hanya aturan pemberian pidana (*strafvoorschriften*).<sup>47</sup>

Dari pendapat di atas secara implisit menyatakan bahwa pedoman pemidanaan merupakan kebijakan legislatif yang “seharusnya” ada dalam aturan/norma hukum pidana materiil yang harus diperhatikan dalam pemberian pidana.

Sedangkan tujuan dalam Kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “arah, haluan (jurusan), maksud, tuntutan (yang dituntut)”.<sup>48</sup> Tujuan pemidanaan berarti arah yang “seharusnya” ingin dicapai dari penjatuhan pidana atau dapat diartikan juga maksud yang hendak didapatkan dari pemberian pidana/pemidanaan. Tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*).

Tujuan pemidanaan secara khusus dapat dilihat dari pendapat Prof. Roeslan Saleh mengenai tiga alasan masih diperlukan hukum pidana dan pidana khususnya alasan yang ketiga yaitu : “pengaruh pidana atau hukuman bukan semata mata ditujukan pada si penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat”.<sup>49</sup> Dari pendapat di atas sangat jelas terlihat bahwa tujuan hukuman/pemberian pidana adalah di samping untuk

---

<sup>47</sup> Sudarto, Kapita Selekta ....Op.cit, hlm. 79.

<sup>48</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Op.cit, hlm. 1077

<sup>49</sup> Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana “ Kebijakan Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum Pidana, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 153

si penjahat itu sendiri tetapi juga untuk masyarakat secara umum agar taat terhadap norma hukum.

Ditetapkan tujuan pemidanaan terkandung maksud agar pidana yang dijatuhkan sesuai dengan keadaan terpidana sehingga dapat mencapai tujuan, di samping sistem pemidanaan ini adalah sistem yang bertujuan (*purposive system*).

Alasan lain ditetapkannya tujuan pemidanaan/pemberian pidana adalah adanya keterbatasan dari sanksi pidana itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh H.L. Packer yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief, yaitu :

“Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama/terbaik dan suatu ketika merupakan pengancam yang utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat-cermat dan secara manusiawi; ia merupakan pengancam apa bila digunakan secara sembarangan dan secara paksa “(*The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used providently and humanely it is guarantor; used indiscriminately and coercively, it is threatener*)”<sup>50</sup>

Pernyataan di atas secara implisit menyarankan agar tujuan pemidanaan ditetapkan sehingga pidana yang dijatuhkan dapat berfungsi sebagai penjamin terhadap tujuan hukum pidana sebagai sarana untuk mencapai perlindungan dan kesejahteraan masyarakat dan juga sebagai penjamin tidak terjadi penurunan derajat kemanusiaan/dehumanisasi dalam pelaksanaan pidana.

Menetapkan tujuan dan pedoman pemberian pidana harus dijadikan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sehingga keputusan

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 156

hakim tersebut dapat terbaca oleh orang lain (masyarakat) dan khususnya oleh orang yang berkepentingan dalam perkara itu. Alasan lain ditetapkan tujuan dan pedoman pemberian pidana adalah dikarenakan pidana itu mengandung pembalasan seperti dikemukakan oleh Leo Polak (yang dikutip oleh Sudarto) dalam bukunya "*De Zin der Vergelding*" (makna dari pembalasan) ; Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling menyedihkan. Sebab ia tidak mengetahui baik dasarnya maupun batasnya-baik tujuannya maupun ukurannya.<sup>51</sup>

Hukum pidana tidak terlepas dari adanya sanksi yang berupa pidana, dalam pelajaran ilmu hukum pidana masalah pidana dan ppidanaan kurang mendapatkan perhatian seperti halnya perhatian terhadap dua masalah pokok lainnya dalam hukum pidana yaitu perbuatan/tindakan dan pertanggung jawaban/kesalahan.

Pemidanaan atau pemberian pidana tidak terlepas dari pengaruh aliran klasik dan aliran modern yang ada dalam hukum pidana. Aliran klasik melihat adanya pidana dikarenakan adanya perbuatan (monistis), sedangkan aliran modern melihat pidana dikarenakan adanya perbuatan dan kesalahan (dualistis). Pengaruh dari kedua aliran ini sampai sekarang masih terasa, berkaitan dengan upaya pembaharuan hukum pidana, mengakomodasikan kedua aliran di atas merupakan alternatif yang terbaik yaitu adanya keseimbangan antara perbuatan dan kesalahan si pembuat atau keseimbangan mono-dualistis.

---

<sup>51</sup> Sudarto, Kapita Selekta....Op.cit, hlm. 79.

Pidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan sekarang ini mendapat sorotan yang sangat tajam dan bahkan telah menjadi masalah bersifat universal, hal ini tidak terlepas dari efektifitas fungsi pidana yang masih diragukan keberhasilannya dalam mencapai tujuan yaitu *social defence* dan *social welfare* (perlindungan dan kesejahteraan masyarakat).

Di samping itu pidana pencabutan kemerdekaan dapat menimbulkan kerugian-kerugian yang bersifat filosofis dan praktis. Dari segi filosofis di dalam pidana (penjara) terdapat hal-hal yang bersifat ambivalen atau saling bertentangan yang antara lain sebagai berikut :

- a) bahwa tujuan dari penjara pertama adalah menjamin pengamanan narapidana dan kedua adalah memberikan kesempatan-kesempatan kepada narapidana untuk direhabilitasi.
- b) bahwa hakikat dari fungsi penjara tersebut di atas seringkali mengakibatkan dehumanisasi pelaku tindak pidana dan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi narapidana yang terlalu lama di dalam lembaga berupa ketidakmampuan narapidana tersebut untuk melanjutkan kehidupannya secara produktif di dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Kerugian lainnya akibat dari dijatuhkannya pidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan yaitu adanya stigmatisasi yang merupakan pidana lain yang harus diterima oleh narapidana setelah kembali di tengah-tengah masyarakat dan kerugian-kerugian lainnya yang tidak saja dialami oleh si narapidana tapi juga dialami oleh keluarganya. Dalam rangka pembaharuan hukum pidana, khususnya masalah pidana dan pemidanaan (pemberian pidana/penjatuhan pidana oleh Hakim) dengan mempertimbangkan kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh pidana

---

<sup>52</sup> Muladi, Teori-teori dan Kebijakan Pedoman, Urgensi Alternatif Pidana Pencabutan Kemerdekaan, Bandung : Alumni, 1992, hlm. 77



maka dalam pemidanaan di samping berdasarkan adanya perbuatan pertanggungjawaban/kesalahan maka tujuan dijatuhkan pidana juga menjadi faktor yang penting dan layak untuk diperhatikan sehingga efektifitas dari fungsi pidana dapat tercapai.

Tujuan menjadi hal yang sama pentingnya didalam pemidanaan karena selama ini pidana (khususnya pidana penjara) seperti yang dikemukakan oleh Berner dan Teeters bahwa penjara telah tumbuh menjadi tempat pencemaran (*a place of contamination*) yang justru oleh penyokong-penyokong penjara dicoba untuk dihindari, sebab di tempat ini penjahat-penjahat kebetulan (*accidental offenders*), pendatang baru di dunia kejahatan (*novices in crime*) dirusak melalui pergaulannya dengan penjahat-penjahat kronis. Bahkan personil yang paling baik pun telah gagal untuk menghilangkan keburukan yang sangat besar dari penjara ini.<sup>53</sup>

Dari pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa pidana/pemidanaan menimbulkan akibat sampingan yang merugikan dan untuk mengurangi dari kerugian tersebut maka tujuan dan pedoman pemidanaan menjadi hal yang sangat penting.

Pada umumnya tujuan pemidanaan dapat dibedakan sebagai berikut:

- a. pembalasan, pengimbalan atau retribusi/absolut.
- b. mempengaruhi tindak laku orang demi perlindungan masyarakat.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Ibid, hlm. 79.

<sup>54</sup> Sudarto, Kapita Selekt... Op.cit, hlm. 81

Untuk menentukan tujuan dan pedoman pemidanaan maka tidak dapat dilepaskan dari tujuan pemidanaan yang selama ini menjadi alasan membenarkan dilakukan pemidanaan, adapun tujuan tersebut sering disebut tujuan pemidanaan yang tradisional yaitu bersifat pembalasan, pengimbangan atau retributif.

Tujuan pemidanaan retributif ini berdasarkan alasan membenarkan bahwa setiap ada pelanggaran hukum harus ada pemidanaan karena hal ini merupakan tuntutan keadilan dan pidana merupakan "*Negation der Negation*" pengingkaran di atas pengingkaran.<sup>55</sup> Pidana merupakan akibat yang mutlak harus ada sebagai suatu pembalasan terhadap orang yang telah melakukan kejahatan dan hal ini semata mata untuk memenuhi rasa keadilan saja, sehingga teori ini disebut juga teori absolute yang sasarannya adalah untuk memperbaiki si pelaku, dalam memperbaiki si pelaku ini meliputi berbagai tujuan antara lain melakukan rehabilitasi, dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defenses*) pemidanaan mengandung empat aspek yang akan menentukan tujuan pemidanaan yaitu : <sup>56</sup>

- a. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, maka timbullah pendapat atau teori bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan.

---

<sup>55</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori....Op.cit, hlm. 12.

<sup>56</sup> Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, BP Undip, Semarang, 1996, hlm. 85-87

- b. Dilihat dari sudut perlunya perlindungan masyarakat terhadap sifat berbahaya orang (si pelaku, maka timbul pendapat yang menyatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk memperbaiki si pelaku.
- c. Dilihat dari perlunya perlindungan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dalam menggunakan sanksi pidana atau reaksi terhadap pelanggar pidana, maka dikatakan bahwa tujuan pidana dan hukum pidana adalah untuk mengatur atau membatasi kewenangan penguasa maupun warga masyarakat pada umumnya.
- d. Aspek lain dari perlindungan masyarakat adalah perlunya mempertahankan keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu atas adanya kejahatan. Sehubungan dengan maka sering pula dikatakan bahwa tujuan pidana adalah untuk memelihara atau memulihkan keseimbangan masyarakat.

Dewasa ini masalah tujuan dan pedoman pemidanaan menjadi suatu perhatian dalam pembaharuan Hukum Pidana sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Berkaitan dengan hal tersebut maka di dalam merumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam pembaharuan sistem pemidanaan “yang dicita-citakan” tidak terlepas dari nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila dari Falsafah Bangsa Indonesia sehingga dapat menggambarkan suatu sistem pemidanaan yaitu Sistem Pemidanaan Pancasila. Yang dimaksudkan dengan sistem Pemidanaan Pancasila adalah dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan yang berkaitan dengan subsistem pemidanaan yaitu : <sup>57</sup>

- a. Jumlah atau lamanya ancaman pidana

---

<sup>57</sup> Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai .....Op.cit, hlm. 130.

- b. Peringatan dan pemberatan pidana
- c. Sistem perumusan dan penerapan pidana seyogyanya selalu berorientasi dengan sila-sila Pancasila.

Dengan demikian diharapkan terwujudnya sistem Pemidanaan yang mengedepankan hal-hal yang bersifat Humanistik dan menghindari terjadinya Dehumanisasi (penurunan derajat kemanusiaan). Dengan menyadari efek negatif yang ditimbulkan oleh pengenaan sanksi pidana maka perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan mempunyai peranan yang sangat strategis untuk mencapai tujuan yang lebih besar yaitu Kesejahteraan Masyarakat (*Social Welfare*).

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Barda Nawawi Arief<sup>58</sup> : bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada.

---

<sup>58</sup> Muladi, Teori-Teori.....Op.cit, hlm. 149

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pembedanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu :<sup>59</sup>

- a. *Absolute* atau *vergeldings theorieen* (*vergelde*/imbalan)  
Aliran ini mengajarkan dasar daripada pembedanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgeding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.
- b. *Relative* atau *doel theorieen* (doel/ maksud, tujuan)  
Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pembedanaan adalah bukan *velgeding*, akan tetapi tujuan (doel) dari pidana itu. Jadi aliran ini menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pembedanaan itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pembedanaan (*nut van de straf*).
- c. Teori gabungan  
Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pembedanaan. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pembedanaan adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pembedanaan itu adalah tujuan daripada hukum.

Istilah pedoman pembedanaan harus dibedakan dengan pengertian pola pembedanaan menunjukan pada suatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun sistem sanksi (hukum) pidana, sedangkan pedoman pembedanaan lebih merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pembedanaan. Jadi pola pembedanaan merupakan bagi badan legislatif.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Bagian Satu, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa, hlm. 56.

<sup>60</sup> Barda Nawawi Arief, Pola Pembedanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP, Jakarta : Departemen Kehakiman, hlm. 1

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak mengenal istilah pedoman pemidanaan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana, baik pidana mati maupun pidana lainnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan warisan kolonial, hanya mengenal istilah hal-hal yang meringankan dan hal-hal memberatkan, hal ini digunakan oleh hakim sehingga saat ini dalam memberikan standar penjatuhan pidana disamping itu juga hakim dalam menjatuhkan pidana bagi terpidana harus melihat atau memperhatikan asas yang terdapat dalam pasal 1 ayat (1) K.U.H Pidana yaitu asas legalitas.

Berlainan dengan kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dalam konsep Rancangan K.U.H. Pidana Baru Tahun 2012, ditentukan atau dicantumkan pedoman pemidanaan. Hal ini diharapkan agar menjadi suatu pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan atau menetapkan pidana, sehingga akan tercapai tujuan pemidanaan tersebut.

Pedoman pemidanaan sangat diperlukan bagi Hakim agar tidak menimbulkan keraguan-keraguan dalam penerapannya dan dapat mempertebal rasa percaya diri bagi Hakim itu sendiri serta lebih jauh dapat memberikan kepastian hukum.

Pedoman pemidanaan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum pidana Baru tahun 2012 tercantum dalam pasal 55.

“Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan :

- a. kesalahan pembuat tindak pidana
- b. motif dan tujuan melakukan kejahatan tindak pidana
- c. sikap batin pembuat tindak pidana
- d. apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana

- e. cara melakukan tindak pidana
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
- g. riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana
- i. pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 55 tersebut di atas mengatakan bahwa pedoman pemidanaan akan sangat membantu hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan. Ini akan memudahkan dalam menetapkan takaran pemidanaan. Jadi merupakan semacam **Cheek List** sebelum Hakim menjatuhkan pidana. Dengan memperhatikan butir-butir yang tercantum dalam daftar tersebut, maka diharapkan pidana yang dijatuhkan dapat lebih profesional dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun oleh terpidana itu sendiri.

Pencantuman butir-butir diatas tidak bersifat limitatif. Hakim bisa saja “menambahkan” pertimbangan pada hal-hal lain selain apa yang tercantum dalam pasal ini. Namun apa yang disebutkan dalam Pasal 55, juga mengatur hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam penjatuhan pidana oleh Hakim. Hal ini tertuang dalam Pasal 132 dan Pasal 134.

Hal yang meringankan menurut Pasal 132 Rancangan K.U.H.Pidana Baru tahun 2012, bahwa Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana harus memperhatikan hal yang meringankan pada diri terpidana diantaranya:

- 1) percobaan melakukan tindak pidana
- 2) pembantuan terjadinya tindak pidana

- 3) penyerahan diri secara sukarela kepada yang berwajib setelah melakukan tindak pidana
- 4) tindak pidana yang dilakukan oleh wanita hamil
- 5) pemberian ganti kerugian yang layak atau perbaikan kerusakan secara sukarela sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan
- 6) tindak pidana yang dilakukan karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat
- 7) tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat sebagaimana dimaksud dalam pasal 39; atau
- 8) faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat

Adapun dasar peringanan yang pertama menyangkut anak dalam melakukan tindak pidana. Dalam ketentuan ini tersimpul bahwa anak yang dibawah umur dua belas tahun yang melakukan tindak pidana, tidak dijatuhi pidana. Peringatan pidana diperuntukkan bagi anak yang berumur 12 tahun sampai dengan 18 tahun percobaan pembuat secara objektif tidak mencapai apa yang dikehendaki, sehingga pidana yang diancamkan wajar untuk dikurangi. Delik, jika dibandingkan dengan pembuat utama adalah kecil oleh karena itu wajar pula apabila ancaman pidana terhadap diperingan.

Lebih lanjut Pasal 134 Rancangan Pidana Baru tahun 2012 yang mengatur mengenai hal yang memberatkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan yaitu :

- 1) Pelanggaran suatu kewajiban jabatan yang khusus diancam dengan pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya oleh karena jabatannya;
- 2) Penggunaan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan, atau lambing Negara Indonesia pada waktu melakukan tindak pidana Universitas Sumatera Utara
- 3) Penyalahgunaan keahlian atau profesi untuk melakukan tindak pidana



- 4) Tindak pidana yang dilakukan orang dewasa bersama-sama dengan anak di bawah umur 18 (delapan belas) tahun
- 5) Tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana
- 6) Tindak pidana yang dilakukan pada waktu terjadi huru-hara atau bencana alam
- 7) Tindak pidana yang dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya
- 8) Pengulangan tindak pidana; atau
- 9) Faktor-faktor lain yang bersumber dari hukum yang hidup dalam masyarakat.

### **C. Pembaharuan Sistem Pidanaan**

Pembaharuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) identik dengan Pembaharuan sistem pidanaaan, hal ini juga seiring dengan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa<sup>61</sup> : sistem pidanaaan substantif terdiri dari sub-sistem aturan umum dan sub-sistem aturan khusus. Oleh karena itu, membicarakan masalah perkembangan sistem pidanaaan tentunya juga mencakup perkembangan dari “aturan umum” (aturan induk) yang terdapat di dalam Buku I KUHP dan “aturan khusus” dalam berbagai undang-undang khusus di luar KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan sub bagian dari sistem pidanaaan bila dilihat dari sudut fungsional/prosesnya/bekerjanya yang terdiri dari hukum pidana materiil, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana, dan dapat juga dilihat dari sudut pengaturannya atau substantif yang terdiri dari aturan yang bersifat umum dan aturan yang bersifat khusus.

---

<sup>61</sup> Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem....Op.cit*, hlm

Dari sudut fungsional/prosesnya memberikan gambaran bagaimana hukum pidana bekerja hingga seseorang dijatuhi pidana, sedangkan dari sudut substantif memberikan gambaran bagaimana pemidanaan/pemberian pidana diatur/dirumuskan/diformulasikan dalam hukum pidana dan hal ini berkaitan dengan tahapan formulasi.

Pembaharuan hukum pidana atau pembaharuan sistem pemidanaan pada dasarnya merupakan sebuah kebijakan/*policy* dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana “penal” yang tidak dapat dilepaskan dari tahapan formulasi, aplikasi dan eksekusi.

Implementasi ide keseimbangan dalam tujuan dan pedoman pemidanaan yaitu adanya “perlindungan masyarakat dan perlindungan individu”, perlindungan masyarakat terkandung dalam asas legalitas yang merupakan asas kemasyarakatan sedangkan perlindungan individu terkandung dalam asas kesalahan/*culpabilitas* yang merupakan asas kemanusiaan/individual.

Bertolak dari “Ide keseimbangan” konsep KUHP tahun 2012 merumuskan tujuan dan pedoman pemidanaan yang formulasinya sebagai berikut :

1. Pemidanaan bertujuan :

- a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

- b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Dari formulasi tujuan pidanaan di atas jelas terkandung makna keseimbangan antara perlindungan umum/masyarakat dan perlindungan individu yang diwujudkan oleh konsep yang merupakan implementasi dari “ide keseimbangan” yang dikedepankan dalam kebijakan formulasi yang dianut oleh konsep sehingga “ide keseimbangan” ini dapat disebut dengan “ide dasar sistem Hukum Pidana Nasional” atau “ide dasar sistem pidanaan Nasional”.

Bertitik tolak dari kenyataan tersebut maka dapat dikatakan konsep KUHP yang sedang menuju tahap “penyempurnaan” telah mengakomodasikan ide keseimbangan yaitu antara keseimbangan kepentingan nasional dan kepentingan internasional.

Implementasi ide keseimbangan yang dijadikan semacam “*Trade Mark*” konsep KUHP tidak saja terbatas pada tujuan pidanaan, ide keseimbangan ini dituangkan juga pada asas dan syarat pidanaan.

Asas yang fundamental sebagai syarat pemidanaan adalah “asas culpabilitas” yang dalam KUHP (WvS) diformulasikan secara implisit, ditegaskan dalam konsep KUHP dirumuskan secara eksplisit yang merupakan keseimbangan dari “asas legalitas”.

Kedua asas di atas (*culpabilitas* dan asas *legalitas*) merupakan perwujudan dari perlindungan kepentingan individu (pelaku) dan perlindungan kepentingan umum (masyarakat). Ide keseimbangan dalam kebijakan formulasi konsep KUHP tidak dapat dihindari sebagai akibat dari adanya upaya “mensinergiskan” perkembangan masyarakat yang sangat dinamis dengan perkembangan sistem hukum nasional di masa yang akan datang “*ius constituendum*” sehingga hukum dapat melakukan fungsinya secara efektif yaitu untuk mengatur tingkah laku manusia dalam pergaulan di dalam masyarakat.

Diformulasikan tujuan dan pedoman pemidanaan oleh konsep KUHP pada dasarnya terkandung maksud agar dapat diterapkan dalam praktek penegakan hukum sehingga tidak dilupakan atau tidak hilang. Kebijakan memformulasikan tujuan dan pedoman pemidanaan juga ditempuh oleh beberapa negara yang telah terlebih dahulu melakukan pembaharuan hukum pidana nasionalnya dapat disebutkan antara lain Negara Armenia, Belarus, Bulgaria, Latvia, Macedonia, Rumania, Yugoslavia dan negara Kirgati.

Kebijakan memformulasikan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana negara tersebut di atas merupakan

tindak lanjut dari *The Tokyo Rules UN Standard Minimum Rules For Non-Custodial Measures* atau disebut “SMR” yang diterima oleh Majelis Umum PBB dalam Resolusi 45/110 tertanggal 14 Desember 1990 yang merupakan Hasil Kongres PBB ke 8 mengenai “*The Prevention of crime and the treatment of offender*” yang diselenggarakan di Havana Cuba pada tanggal 27 Agustus sampai dengan 7 September 1990, dalam salah satu alasan perlunya SMR di atas yaitu “pembatasan kemerdekaan hanya dapat dibenarkan dilihat dari sudut keamanan masyarakat (*public safety*), pencegahan kejahatan (*crime prevention*), pembalasan yang adil dan penangkalan (*just retribution and deterrence*), dan tujuan utama dari sistem peradilan pidana adalah “reintegrasi pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat” (*reintegration of offender into society*)”<sup>62</sup>

Lebih ditegaskan lagi dalam prinsip umum SMR yaitu “Dalam mengimplementasikan SMR ini tiap negara harus berusaha untuk menjamin keseimbangan antara hak-hak individual si pelaku tindak pidana, hak-hak korban, dan kepentingan masyarakat berupa keamanan publik dan pencegahan kejahatan”.<sup>63</sup>

Dilihat dari *integrative approach* (pendekatan integratif) formulasi tujuan pidana berbagai Negara di atas dan konsep KUHP yang pada intinya mengandung “Ide keseimbangan” antara perlindungan kepentingan umum dan perlindungan kepentingan individu, dapat juga dilihat dari *contractive approach* (pendekatan perbedaan). Konsep KUHP dalam

---

<sup>62</sup> Barda Nawawi Arief, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 107-108.

<sup>63</sup> Ibid, hlm. 109

formulasi tujuan pidana merumuskan melalui “membebaskan rasa bersalah terpidana” sebagai pengamalan dari sila pertama Pancasila yang merupakan “ *way of life*” bangsa Indonesia. Berkaitan dengan perbedaan ini dapat dimaklumi dikarenakan perbedaan karakteristik masing-masing negara dalam memandang “tanggung jawab” atas suatu perbuatan yang dilakukan dan hal ini berkaitan dengan “komitmen religius”.

Merumuskan tujuan pemidanaan dengan “membebaskan rasa bersalah terpidana” juga mengandung makna memberi motivasi psikologis pada terpidana bahwa perbuatannya “telah termaafkan” sehingga diharapkan tumbuh semangat baru untuk berbuat yang baik dalam menjalani kehidupannya sesuai etika hukum dan etika sosial.

Dari redaksional tujuan dan pedoman pemidanaan dalam konsep (RUU KUHP) terlihat adanya pengaruh aliran Neoklasik, hal ini terbukti dari pendapat Muladi yang menegaskan antara lain sebagai berikut. “Secara sadar Tim RUU KUHP Nasional mengadopsi aliran Neo-Klasik dalam Hukum Pidana, karena melihat kelemahan-kelemahan yang mendasar dari baik aliran klasik maupun aliran modern (positif)”<sup>64</sup>

Lebih lanjut Muladi menjelaskan bahwa aliran Neo Klasik dipandang oleh banyak negara sangat manusiawi dan menggambarkan perimbangan kepentingan secara proporsional. Karakteristiknya sebagai berikut : Modifikasi doktrin kebebasan kehendak atas dasar usia, patologi dan

---

<sup>64</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung : Mandar Maja, 1995, hlm. 81.

lingkungan, *daaddaderstrafrech*, menggalakkan *expert testimony*, mengembangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana, mengembangkan *twin tracksystem* yakni pidana dan tindakan, perpaduan antara *Justice Model* dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa/terpidana termasuk pengembangan *non-institutional Treatment (Tokyo Rules)* dan dekriminalisasi dan depenalisasi.<sup>65</sup>

Tujuan pidana berupa : mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman adalah terkandung maksud perwujudan dari perlindungan masyarakat, sehingga dikatakan tujuan ini selaras dengan teori pidana utilitarian atau kemanfaatan dengan kata lain memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna, mengisyaratkan bahwa pidana yang dijatuhkan dimaksudkan untuk memberi kesempatan pelaku untuk memperbaiki dan memasyarakatkan dirinya atau dapat dikatakan tujuan pidana ini terkandung Rehabilitasi dan Resosialisasi.

Terhadap pedoman pidana : pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan, ini merupakan perwujudan dari perlindungan kepentingan masyarakat. Penilaian masyarakat terhadap sebuah peristiwa pidana yang terjadi diharapkan mampu diserap, didengar, dan diakomodasikan oleh Hakim dalam penentuan pidana. Adanya rumusan yang demikian merupakan konsekuensi bahwa "Tindak

---

<sup>65</sup> Ibid, hlm. 82

Pidana” yang terjadi pada dasarnya juga “melukai” ketenteraman masyarakat yang telah terbina sehingga diperlukan saluran pembalasan dan penyembuhan melalui pidana yang ditetapkan oleh Hakim.

Rumusan pedoman pemidanaan : tindak pidana yang dilakukan dengan berencana merupakan pedoman Hakim untuk memperberat dan memperingan pidana yang akan dijatuhkan, sedangkan rumusan permidanaan yang lainnya, selain yang disebutkan di atas merupakan rumusan yang memberi perlindungan kepentingan tersangka/terdakwa.

#### **D. Pengertian dan Jenis-jenis Barang Rampasan**

##### **1. Pengertian.**

Barang rampasan itu adalah barang yang merupakan alat atau barang bukti, dan barang bukti tersebut dapat dilelang apabila telah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>66</sup>

Di dalam kamus hukum menyebutkan tentang pengertian rampasan, yaitu hukuman tambahan yang memungkinkan pemilikan suatu barang oleh atas benda-benda yang dimiliki/dikuasai atau yang berasal dari kejahatan yang telah dilakukan dan telah dijatuhi hukuman.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> Kejaksaan Agung RI. Himpunan....Op.cit, hlm. 1206

<sup>67</sup> Simorangkir, J.C.T.,dkk. Kamus.....Op.cit, hlm. 126.



Barang rampasan ini apabila akan dilakukan pelelangan itu dilaksanakan secara bersama, tidak dapat dilakukan secara terpisah kecuali bila keadaan terdesak seperti yang dijelaskan di dalam point 9 Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang menyebutkan bahwa : “ Terhadap barang rampasan yang termasuk dalam satu putusan Pengadilan pada prinsipnya tidak diperkenankan di jual lelang secara terpisah-pisah, kecuali dalam keadaan terdesak.”<sup>68</sup>

Adapun barang rampasan yang dimaksudkan di dalam point 9 Surat Edaran tersebut terhadap barang rampasan yang diperkenankan secara terpisah antara lain : barang sengketa dalam perkara perdata, barang yang dituntut oleh pihak ke tiga, barang yang akan diajukan bagi kepentingan Negara atau Sosial, barang yang akan diajukan untuk dimusnahkan dan barang rampasan yang berada di luar daerah hukum Kejaksaan yang bersangkutan. Terhadap barang rampasan yang berada di wilayah perairan itu sebelum dilakukan pelelangan itu harus mendapat izin terlebih dahulu dari Menteri Keuangan seperti yang disebutkan di dalam point 7 huruf d Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, dan apabila izin itu telah diberikan maka pelelangan terhadap barang rampasan

---

<sup>68</sup> Kejaksaan Agung RI. Himpunan....Op.cit, hlm. 1210

tersebut dapat dilaksanakan. Biasanya barang rampasan di wilayah perairan tersebut digunakan untuk kepentingan Negara.<sup>69</sup>

Menurut peraturan pelaksanaan lelang terhadap barang rampasan, terhadap barang rampasan yang keberadaannya dapat membahayakan bagi kepentingan Negara atau sosial, dengan kata lain tidak dapat dipergunakan lagi (berdasarkan sub V. narkotika point 5 Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan),<sup>70</sup> maka barang rampasan tersebut dimusnahkan seizin pihak yang berwenang. Contoh barang rampasan yang tidak dapat dipergunakan ini antara lain : jenis-jenis tertentu dari narkotika seperti ganja, obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya.

## **2. Jenis-Jenis Barang Rampasan.**

Berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP- 089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan di dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14 yang menyebutkan jenis-jenis barang rampasan, yaitu : <sup>71</sup>

1. Barang-barang rampasan yang dikenakan larangan import dan dilarang untuk diedarkan. Maksud kalimat di atas adalah barang-barang rampasan jenis ini pada saat penerimaannya itu tidak memiliki dokumen-dokumen atau surat-surat yang lengkap atau merupakan barang selundupan. Jenis-jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya yaitu : alat-alat elektronik,

---

<sup>69</sup> Ibid, hlm. 1214.

<sup>70</sup> Ibid, hlm.. 1224.

<sup>71</sup> Ibid hlm. 1211 – 1219

- mobil, kapal dan lain sebagainya, dan biasanya barang-barang rampasan ini digunakan untuk kepentingan Negara atau sosial.
2. Barang-barang rampasan yang digunakan untuk kepentingan Negara atau sosial. Maksud kalimat diatas adalah barang-barang rampasan jenis ini keberadaannya dapat dimanfaatkan bagi kepentingan Negara maupun sosial. Jenis-jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya antara lain seperti : motor, rumah (dalam kasus perdata), dan lain sebagainya.
  3. Barang-barang rampasan yang dimusnahkan. Maksud kalimat di atas adalah barang-barang rampasan jenis ini keberadaannya dapat tidak dimanfaatkan bagi kepentingan Negara maupun sosial. Jenis-jenis barang rampasan yang termasuk di dalamnya antara lain : ganja, heroin, obat-obatan terlarang, morfin dan lain sebagainya. Di dalam penyelesaian barang rampasan jenis ini Jaksa Agung Republik Indonesia bekerjasama dengan Menteri Kesehatan.

### **3. Penyelesaian Barang Rampasan.**

Mengenai penyelesaian barang rampasan ini diatur di dalam Surat Edaran Nomor : SE-03/B/B.5/8/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan, yang menyebutkan bahwa :<sup>72</sup>

- a. Tenggang waktu untuk menyelesaikan barang rampasan dibatasi selambat-lambatnya dalam masa 4 ( empat ) bulan semenjak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Tenggang waktu tersebut mengikat dan merupakan kewajiban bagi kejaksaan untuk menaatinya.

Menurut Pasal 273 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP disebutkan bahwa : “

Ayat (3) :

“ Jika putusan pengadilan menetapkan bahwa barang bukti dirampas untuk negara, selain pengecualian sebagaimana tersebut pada Pasal 46, Jaksa menguasai benda tersebut

---

<sup>72</sup> Ibid, hlm.1211 – 1212

kepada Kantor Lelang Negara dan dalam waktu 3 ( tiga ) bulan untuk dijual lelang, yang hasilnya dimasukkan ke kas negara untuk dan atas nama jaksa.”

Ayat (4) :

“ Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (3) dapat diperpanjang untuk paling lama satu bulan.”

- b. Penyelesaian barang rampasan pada umumnya diselesaikan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kecuali untuk barang-barang rampasan tertentu Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan lain yaitu digunakan bagi kepentingan Negara, sosial atau dimusnahkan, seperti barang-barang rampasan dalam perkara penyelundupan yang dilarang untuk di import dan dilarang untuk diedarkan. Terutama terhadap barang-barang rampasan dalam penyelundupan yang dilarang untuk diimport dan dilarang untuk diedarkan. Dalam hal ini Jaksa Agung Republik Indonesia dapat menetapkan barang-barang tersebut untuk digunakan untuk kepentingan negara atau sosial atau untuk dimusnahkan. Tindakan ini perlu diambil untuk mengamankan dan atau melindungi barang-barang yang telah dapat di produksi dalam Negeri.

Setiap satuan barang rampasan dari suatu perkara yang putusan pengadilannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut di terima sudah harus dilimpahkan penanganannya oleh bidang yang menangani sebelum menjadi barang

rampasan kepada Bidang yang berwenang menyelesaikannya dengan melampirkan salinan vonnis atau *extract vonnis*, dan pendapat hukum. Mengenai hal tersebut di atas di dalam Pasal 28 ayat (2) UU No. 27 Tahun 1983, di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa :

“ Pengeluaran barang rampasan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dilakukan atas permintaan jaksa secara tertulis.”

Sebagaimana yang dimaksud dalam butir 3. a. harus dilakukan dengan suatu berita acara.

- c. Untuk dipergunakan bagi kepentingan Negara atau sosial atau barang-barang rampasan terutama yang berasal dari perkara penyelundupan dan pelanggaran wilayah R.I. dalam penyelesaiannya digunakan INPRES Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai Negara, dalam rangka pengajuan premi/ganjaran.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-Buku :**

Atmasasmita, Romli, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi, Bandung : Mandar Maja,

Enschede, Ch. J, 2002, Beginselen van Starfrecht, Kluwer Deventer, 10e druk

Fleming, Matthew H, 2005, Asset Recovery and Its Impact on Criminal Behavior, An Economic Taxonomy: Draft for Comments, Version Date, London: University College,

Greenberg, Theodore S., et.al, 2009, Stolen Asset Recovery; A Good Practices for Non-Conviction Based Asset Forfeiture, The World Bank, Washington D.C.

Hamzah, Andi, 1986, Kamus Hukum, Jakarta : Ghalia,

Ibrahim, Johnny, 2005, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya : Bayumedia Publishing,

J. Enschede, Ch., 2002, Beginselen van Starfrecht, Kluwer Deventer, 10e druk,

Kartanegara, Satochid, Hukum Pidana Bagian Satu, Jakarta : Balai Lektur Mahasiswa,

Kawanto, Ichsan, 2009, Suap Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jakarta : Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Press,

Kejaksaan Agung RI. 1988, Himpunan Peraturan Tentang Pembinaan. Jakarta : Kejaksaan Agung RI.

Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, 2000, Yogyakarta: Liberty,

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Bandung : Penerbit Alumni,

M. Amin, S., 1981, Hukum Acara Pengadilan Negeri Jakarta, Jakarta : Pradya Paramita,

M. Stephenson, Kevin, et al., 2011, Barriers to Asset Recovery, World Bank, Washington DC,

Nawawi Arief, Barda, 1996, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, Semarang : BP Undip,

\_\_\_\_\_, 1998, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya Bakti,

\_\_\_\_\_, 2002, Sari Kuliah Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : Raja Grafindo Persada,

\_\_\_\_\_, 2005, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Bandung : PT Citra Adhya Bakti,

\_\_\_\_\_, 2009, Perkembangan Sistem Pemidanaan di Indonesia, cetakan ke-II, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

\_\_\_\_\_, 2009, Tujuan dan Pedoman Pemidanaan, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro,

\_\_\_\_\_, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta : Kencana,

\_\_\_\_\_, 2010, Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Perbandingan Hukum Pidana), Semarang : Badan Penerbit UNDIP,

\_\_\_\_\_, 2010, Perbandingan Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers,

\_\_\_\_\_, Sistem Pemidanaan dalam Ketentuan Umum Buku I RUU KUHP 2004,

\_\_\_\_\_, Pola Pemidanaan Menurut KUHP dan Konsep KUHP, Jakarta : Departemen Kehakiman,

NN, Denying Safe Haven to the Corrupt and the Proceeds of Corruption, Manila: ADB, 2006,

Peter Hoefnagels, G, 1969, The Other Side of Criminology, Belanda : Kluwer,



Prasetyo, Teguh dan Abdul Halim Barkatuilah, 2005, Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi), Yogyakarta : Pustaka Pelajar,

Simorangkir, J.C.T.,dkk. 2000,Kamus Hukum. Jakarta : Sinar Grafika,

Serikat Putra Jaya, Nyoman, 2010, Bahan Kuliah Pembaharuan Hukum Pidana, Semarang : UNIP

Sudarto, 1981, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung : Alumni,

\_\_\_\_\_, 1983, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Bandung : Penerbit Sinar Baru,

\_\_\_\_\_, 1986, Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung : Alumni,

\_\_\_\_\_, 1990, Hukum Pidana I, Semarang : Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNIP,

U. Utrecht, 1960, Hukum Pidana I, Bandung : Penerbitan Universitas,

Yahya Harahap, M., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. kedelapan,.

Yuwono, Soesilo, 1982, Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur, Bandung : Alumni,

Y. Kanter, E.dan S.R. Sianturi, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Jakarta : Stora Grafika,

### **Makalah dan Tulisan Ilmiah:**

Busro, Achmad, 2011.Optimalisasi Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pengembalian Keuangan Dan Atau Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi Maupun Atas Dasar Kerugian Keperdataan; Ringkasan Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang,

Effendy, Marwan, Peran Kerjasama Luar Negeri Dalam Upaya Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi, Makalah disampaikan dalam seminar nasional Universitas Diponegoro 17 November 2009, Semarang,

Muladi, 1990, Proyeksi Hukum Materiil Indonesia di Masa Datang, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum Pidana, Semarang,

Nawawi Arief, Barda, Perkembangan Sistem Pemidanaan, Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI Tahun 2005,

Sumiati, Sri, Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Korban Tindak Pidana Di Bidang Medis, Tesis Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang : UNDIP, 2009,

Bulletin of United States Attorneys Vo.55 No.66 November 2007

**Internet:**

<http://www.antaraneews.com/berita/287320/indonesia-masih-tergolong-negara-terkorup>, yang di unggah pada Kamis, 1 Desember 2011 22:53 WIB.

[www.djpp.depkmham.go.id/rancangan/inc/buka.php](http://www.djpp.depkmham.go.id/rancangan/inc/buka.php)

<http://massofa.wordpress.com/2008/11/13/kajian-ilmu-kebijakan-dan-pengertian-kebijakan>, di unggah pada tanggal 13 November 2008.

[www.proxis.com/perundangan/LH/doc/uu/C00-1999-00031.pdf](http://www.proxis.com/perundangan/LH/doc/uu/C00-1999-00031.pdf)

**Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Konsep KUHP 2012

Undang-Undang No 8 tahun 1981 (KUHP)

Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

United Nations Convention Against Corruption (UNCAC 2003)

Undang-Undang No 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC 2003

Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana

Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

KUHP Albania

KUHP Swiss

KUHP Jerman

KUHP Thailand

KUHP Fiji

KUHP Irlandia